

PENELUSURAN ASPEK EKONOMI PADA PONDOK PESANTREN DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA

Syahyuti¹⁾

ABSTRACT

As a origin institution in rural area, pesantren always involve in activities of its environment, even in economic activity. Recently, pesantren has been considered as an alternative institution as an entry point by outsider to enhance agricultural development in rural communities. Not as common people knowledge, in fact, pesantren has adaptive power to rural community changes. Eventhought one of the main objective of pesantren is Islamic education, but it is also involved in politics since colonial era. The economic vision of pesantren is rather weak, but in the daily activities they proceed quite good like establish a cooperative, retail business, and so on. Economic aspect is one important part in pesantren organization, especially at madrasah and nonprofit organization.

Key words: pesantren, economy, institution.

ABSTRAK

Sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia, pesantren selalu melibatkan diri dengan perubahan masyarakat di sekitarnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Akhir-akhir ini, pesantren telah dipandang sebagai lembaga alternatif yang dijadikan *entry point* oleh berbagai pihak luar ke dalam masyarakat desa, misalnya dalam bidang pembangunan pertanian. Mungkin tidak sebagaimana pengetahuan banyak orang, pesantren sebenarnya memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi terhadap perubahan di lingkungannya. Meskipun tujuan utama lembaga pesantren adalah pada wacana pendidikan, namun secara historik terbukti ia telah ikut melibatkan diri secara intens dalam dunia lain misalnya dunia politik semenjak zaman kolonial Belanda. Dalam wacana ekonomipun pesantren memiliki visi meskipun hanya bersifat minor dalam materi pengajarannya. Sikap dan perilaku terhadap aspek ekonomi lebih berbentuk dalam tataran praktis sehari-hari. Beberapa studi terakhir mendapatkan bahwa aspek ekonomi sudah menjadi bagian yang inheren dan semakin jelas dalam struktur kehidupan pesantren, terutama pada pesantren yang berbentuk madrasah dalam bentuk organisasi yayasan.

Kata Kunci: pesantren, ekonomi, kelembagaan.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga asli Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitarnya di pedesaan. Meskipun pesantren memiliki otonomi yang tegas namun ia tak pernah melepaskan diri dari dinamika komunitas di luarnya. Khususnya semenjak Orde Baru, pondok pesantren telah dijadikan sebagai satu lembaga alternatif yang penuh harapan sebagai pintu akses (*entry point*) pihak luar - terutama pemerintah - ke masyarakat pedesaan dengan menjadikan pesantren sebagai agen pembangunan. Pesantren telah menjadi semacam magnet yang tidak hanya menarik para tokoh politik yang bersifat temporer, namun terutama dari departemen-departemen teknis.

Pada sisi lain, pesantren secara lambat laun juga merubah dirinya sendiri sesuai dengan sifatnya yang selalu merespon perubahan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sebagai lembaga yang tampaknya akan lebih "diberdayakan" lagi di masa mendatang, maka sudah sepantasnya dikenali lebih jauh karakteristiknya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan, baik demi kepentingan pesantren itu sendiri maupun untuk menghindari terjadinya kesalahan penanganan. Kesalahan pendekatan yang telah terjadi selama ini telah mengakibatkan "rusaknya" berbagai lembaga *indigenous* di desa karena pengaruh intervensi pihak luar sebagaimana dicatat Sajogyo (1992). Penanganan terhadap pesantren semestinya sesuai dengan pepatah "menarik rambut dari tepung, rambut tak putus dan tepung pun tak tumpah". Artinya, pendekatan yang

1) Asisten Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

digunakan haruslah penuh dengan kehati-hatian, agar kepentingan ganda – pihak luar dan pesantren - tersebut dapat dicapai.

Fungsi utama pesantren adalah dalam bidang pendidikan, namun selama ini terbukti ia ikut berperan dalam bidang sosial kemasayarakatan dan politik, misalnya berperan dalam melahirkan tokoh-tokoh perjuangan di Indonesia. Pesantren dijadikan sekaligus sebagai wadah dan lambang perjuangan rakyat. Bidang ekonomi dapat dianggap relatif baru dalam dunia pesantren, khususnya dalam pengertian ekonomi dalam tataran konsep dan praktis, misalnya pengajaran keterampilan, kewiraswastaan, menjadikan pesantren sebagai badan usaha, dan lain-lain. Introduksi ekonomi ke pesantren sejak era 70-an telah dilakukan oleh pihak LSM dan pemerintah, meskipun keberhasilannya masih beragam. Semenjak dekade 90-an telah cukup banyak pesantren yang menjadikan ekonomi sebagai aspek penting strukturnya, yang tidak hanya demi kepentingan kelancaran proses pendidikan, tetapi meluas kepada kemandirian pondok serta ekspektasi kemandirian alumninya.

Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi visi ekonomi dalam struktur sosial pondok pesantren serta analisis kesiapan pesantren dalam bidang ekonomi. Visi ekonomi tersebut dipelajari dari prinsip-prinsip, tujuan, dan karakteristik elemen-elemen pondok pesantren.

Uraian ini dimulai dengan paparan aspek-aspek mendasar dari institusi pesantren, kemudian dilanjutkan dengan usaha menemukan visi ekonomi dalam kehidupan pesantren, baik melalui materi pelajaran yang diberikan kepada santri, maupun karakteristik struktur kehidupan pesantren, mulai dari keragaan ekonomi pesantren, kyai, dan santri. Pada bagian akhir akan disampaikan analisis peluang pengembangan ekonomi di pesantren di masa mendatang, dengan didasarkan pada struktur ekonomi internal dan jaringan antar pondok, serta beberapa kasus bentuk usaha-usaha yang telah berkembang selama ini.

ARTI KATA DAN ASAL PONDOK PESANTREN

Menurut buku Ensiklopedi Islam (Anonim, 1993), kata pesantren berasal dari Bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji”, sementara sumber lain menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa India *shastri* dari akar kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Dhofier (1994), juga

menyebutkan bahwa kata *shastri* tersebut berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.

Dengan agak sedikit berbeda, Madjid (1997) mengutarakan bahwa kata pesantren dengan kata dasar santri, kemungkinan berasal dari kata *sastri* dari bahasa Sanskerta yang berarti melek huruf. Ia juga menyebutkan versi lain, yaitu kemungkinan pesantren atau santri tersebut berasal dari bahasa Jawa (*cantrik*), yaitu seseorang yang mengikuti seorang guru kemanapun guru tersebut pergi menetap. Kegiatan mengikuti guru tersebut adalah dalam rangka belajar dan meniru seluruh perilaku guru bersangkutan, atau dapat dikatakan sebagai kegiatan magang. Pola hubungan *guru-cantrik* ini berevolusi kemudian menjadi hubungan *kyai-santri*. Dalam bahasa Jawa, kata *cantrik* juga dipakai untuk seseorang yang menumpang di rumah orang lain yang memiliki sawah dan ladang untuk jadi buruh tani. Sementara itu, antropolog Clifford Geertz (1989), menggunakan kata santri untuk membedakan dalam tiga kategori orang Jawa yaitu priyayi, santri, dan abangan. Menurut Geertz “santri” adalah sebutan untuk orang Islam di Jawa yang memiliki kecenderungan lebih kuat pada ajaran agamanya, sedangkan yang lebih kuat tradisi kejawennya disebut “abangan”.

Kata “pondok” yang selalu dilekatkan pada kata pesantren, menunjuk kepada asrama tempat tinggal siswa dari bambu, yang mungkin berasal dari kata Arab *fundug* yang berarti hotel atau asrama (Dhofier, 1994). Pada masa-masa awal perkembangan sebuah pesantren, ketika belum ada asrama, para santri mendirikan pondok-pondok sederhana dengan bahan-bahan yang bisa didapatkan secara mudah. Pondok-pondok tersebut didirikan di sekitar rumah kyai sebagai tempat tinggalnya selama belajar yang diisi oleh beberapa orang santri sekaligus. Membangun pondok-pondok jelas lebih mudah dan murah dibandingkan membangun asrama yang lebih permanen, mengingat pada saat pertama berdiri bantuan masyarakat sekitar masih lemah atau hampir belum ada, kecuali berupa lahan kosong yang biasanya diwakafkan.

Penelusuran asal kata ini dapat digunakan untuk menelusuri asal bentuk pendidikan yang sering disebut sebagai satu-satunya bentuk pendidikan asli Indonesia ini. Menurut Madjid (1997), ada dua pendapat tentang asal bentuk pendidikan pesantren. Pendapat pertama meyakini pesantren adalah modifikasi dari tradisi Islam sendiri yaitu dari sistem gilda yang digunakan oleh pengamal tasawuf di Timur Tengah pada zaman dahulu.

Namun, pendapat kedua justeru sangat berbeda, karena meyakini bahwa pesantren bukanlah berasal dari tradisi Islam, namun mengadopsi sistem pendidikan yang digunakan dalam masyarakat Hindu-Budha.

Lebih jauh dalam buku Ensiklopedi Islam (Anonim, 1993), dikatakan bahwa, khusus untuk Indonesia, juga ada dua versi pendapat mengenai asal usul dan latar belakang berdirinya pesantren. Pertama pendapat menyebutkan bahwa pesantren berakar dari tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pesantren memiliki kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Prakteknya adalah berupa suluk selama empat puluh hari dan tinggal bersama dengan dipimpin oleh seorang kyai. Untuk keperluan suluk tersebut, disediakan ruangan-ruangan khusus di kiri kanan mesjid. Di samping mengajarkan tarekat, juga diajarkan kitab-kitab agama Islam. Aktivitas ini kemudian disebut dengan pengajian, yang dalam perkembangan selanjutnya berkembang menjadi pesantren.

Sementara itu, pendapat yang kedua, berpendapat bahwa pesantren mencontoh dan memodifikasi pola pendidikan Hindu. Hal ini didasarkan fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia lembaga seperti pesantren sudah ada yang digunakan sebagai tempat belajar agama Hindu dan membina kader-kader penyebar agama Hindu. Fakta pendukung lain yang menunjukkan bahwa pesantren bukan sekedar dari tradisi Islam adalah tidak ditemukannya lembaga pesantren di negara-negara Islam selain Indonesia, sementara lembaga serupa banyak ditemukan di dalam masyarakat Hindu dan Budha di India, Myanmar, dan Thailand.

PRINSIP, TUJUAN, DAN ELEMEN PONDOK PESANTREN

Ada lima elemen yang selalu dapat ditemukan pada sebuah pondok pesantren, yaitu pondok tempat tinggal santri, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, kyai, serta santri. Bebera pesantren mengkhususkan diri hanya untuk siswa putra atau putri, atau ada yang sekaligus keduanya. Tempat tinggal santri dapat berupa pondok-pondok yang terpisah atau asrama, namun selalu dipisahkan secara tegas antara tempat tinggal laki-laki dan perempuan. Bahkan untuk hampir segala aktivitas di pesantren, wilayah laki-laki dan perempuan selalu terpisah. Pemisah kedua wilayah

tersebut biasanya adalah rumah kyai beserta keluarganya yang dibangun dekat masjid di tengah kompleks.

Mungkin tidak sebagaimana anggapan banyak orang, pesantren bukanlah lembaga yang steril dengan misi yang murni kepada soal keagamaan. Satu ciri pesantren yang penting justeru adalah kemampuannya mengikuti perubahan sehingga ia tetap *survive* di tengah masyarakat. Perubahan tersebut terjadi dalam hampir segala aspek, yaitu pada sistem pengajaran, materi pelajaran, bentuk organisasi, pendanaan, dan lain-lain. Buktinya adalah, pesantren tetap bertahan karena mampu melakukan *adjustment* dan *readjustment* yang terkait erat dengan komunitas lingkungannya (Madjid, 1997). Meskipun terlibat dengan dinamika masyarakat sekitarnya, pesantren memiliki tujuan utama untuk mewarnai masyarakat sekitarnya, dimana kyai berperan sebagai pialang budaya (*cultural brokers*).

Tujuan pendidikan pesantren bukanlah mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan (Dhofier, 1994). Sementara cita-cita pendidikan pesantren adalah sebagai latihan untuk berdiri sendiri dan membina diri agar tidak mengantungkan sesuatu kepada orang lain kecuali kepada Tuhan (Dhofier, 1994). Materi pelajaran dalam pesantren yang terdiri dari jurisprudensi, teologi dan tasawuf menekankan prinsip-prinsip tersebut. Kehidupan di pesantren adalah perpaduan antara teori di kelas-kelas belajar dan praktek yang langsung mengikuti sikap dan pola hidup kyai (magang) dan juga diawasi kyai. Ketaatan terhadap kyai tidak hanya karena struktur feodal yang dibangun namun bahkan cenderung bersifat mistik

Saat ini dapat ditemukan dua bentuk pesantren berdasarkan sistem pendidikannya, yaitu pesantren *salafi* (tradisional) yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik dengan sistem sorogan, bandongan, dan musyawarah. Yang kedua adalah pesantren *khalafi* (modern) yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum, baik dengan menambahkan madrasah dalam pesantren atau hanya membuka sekolah umum (madrasah) saja. Dalam penelitian Taryoto dkk. (1997) ditemukan madrasah yang berada di bawah yayasan, yang sesungguhnya lebih tepat jika disebut sebagai sekolah agama saja, tampaknya tetap dikategorikan sebagai pesantren. Agak sulit menyebut sekolah-sekolah seperti ini dengan pesantren, karena selain pengajar dan siswanya jauh berbeda dengan sosok

kyai dan santri, elemen dasar pesantren yang lain juga tak dipenuhinya, karena tak ada pondok tempat tinggal siswa, tidak lagi mengajarkan kitab-kitab Islam klasik, serta tidak ada masjid di lingkungannya. Jikapun ada, masjid tidak lagi dijadikan sebagai sentra aktifitas pengajaran sehari-hari. Masjid hanya menjadi tempat sholat belaka.

Sebenarnya telah terjadi perubahan makna kata *salafi* yang akhirnya sekarang sinonim dengan tradisional. *Salafi* sesungguhnya adalah sebutan untuk suatu gerakan yang bertujuan memurnikan peribadatan Islam yang dulu berkembang pada sebagian pesantren-pesantren di tanah air, karena mencampurkan peribadatan Islam dengan kultur Jawa, misalnya terluar banyaknya "selamatan" yang merupakan ciri sinkretisme Jawa. Usaha tersebut tidak sepenuhnya berhasil, karena sampai saat inipun pesantren-pesantren tersebut masih tetap ada. Namun anehnya, pesantren-pesantren yang dikritik tersebut sekarang malah disebut sebagai pesantren *salafi*.

Masuknya materi pelajaran umum ke dalam sistem pendidikan pesantren didorong oleh keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 1975 yang menetapkan mata pelajaran umum di madrasah sekurang-kurangnya harus tujuh puluh persen dari seluruh kurikulum (Anonim, 1993). Masuknya materi dan sistem pendidikan umum, yang sering dicap sebagai sistem pendidikan Barat sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum itu yang pada mulanya menimbulkan pro dan kontra, sebagaimana dipaparkan secara panjang lebar dalam tulisan Steenbrink (1974). Lebih jauh ia menjelaskan, proses perubahan bentuk dan isi pendidikan Islam di Indonesia tidaklah mulus dan lancar, karena ada perselisihan di dalamnya yang disebabkan latar belakang politik pendidikan kolonial yang ikut menentukan ketegangan perubahan dari tradisi yang sangat kukuh ke cara-cara modern yang mendesak.

Memasukkan keterampilan untuk kemandirian adalah bentuk yang lebih maju lagi dari berbagai perubahan sistem pendidikan di pesantren selain memasukkan materi umum ke dalam kurikulum. Satu di antaranya yang sangat menonjol adalah mengajarkan bahasa Inggris di PP Gontor sebagai bahasa pengantar sehari-hari dalam lingkungan pondok (Madjid, 1997). Contoh lainnya, di Jawa Barat Perserikatan Ulama se-Jabar tahun 1932 sepakat memasukkan pelajaran

keterampilan ke dalam pesantren yang kemudian berbentuk pesantren dengan nama "Santi Asrama". Keterampilan yang dipelajari adalah berupa pertukangan, industri rumah tangga, dan jahit-menjahit.

Pertanian juga menjadi salah satu bidang keterampilan yang mulai dijamah pesantren dalam pengertian pertanian modern, karena bertani secara tradisional bukanlah sesuatu yang asing di lingkungan pesantren. Karena selain kebanyakan santri berasal dari keluarga petani, cukup banyak santri yang memperoleh pendapatan tambahan dengan bekerja sebagai buruh tani pada masyarakat sekitar, atau menjadi buruh di lahan milik kyai. Secara umum keterampilan pertanian masuk pada tahun 1950-1960 saat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi (Madjid, 1997).

Selanjutnya Pemerintah Orde Baru juga melakukan penetrasi ke pondok-pondok pesantren dan menginginkan substansi ilmu kalam yang diajarkan di pesantren diharapkan bukan lagi Teologi Asyriyah atau Jabariyah, tetapi teologi yang kondusif bagi pembangunan, yakni teologi yang lebih mendorong bagi tumbuhnya prakarsa, usaha atau etos kerja. Hal ini dapat dikatakan perubahan dari fungsi pendidikan ke fungsi sosial ekonomi sebagaimana dikatakan Madjid (1997). Jika dulu para ulama dan kyai mempunyai kedudukan yang kokoh di lingkungan kerajaan dan keraton, yaitu sebagai penasihat raja dan sultan, maka sekarang bergeser sebagai "pembantu" atau "ujung tombak" pemerintah. Pada tahun 1975 muncul gagasan baru dalam usaha pengembangan pesantren, yaitu mendirikan pondok pesantren model baru, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, dengan nama Pondok Karya Pembangunan (PKP), Pondok Modern, Islamic Centre, atau Pondok Pesantren Pembangunan (Anonim, 1993). Akan tetapi, pondok pesantren baru ini mengalami kesulitan dalam pembinaannya karena tiadanya kyai yang kharismatik dan dapat memberikan bimbingan dan teladan kepada santri-santrinya.

Satu hal yang dikritik oleh Madjid (1997) dalam pola pendidikan pesantren adalah karena santri lebih bersifat reproduktif dan kurang kreatif. Selain itu, para santri mengidap penyakit rasa rendah diri dalam pergaulan ketika bersosialisasi dengan masyarakat luar. Hal inilah yang melatarbelakangi golongan cendekiawan untuk mendorong perubahan dalam bentuk dan metoda pendidikan di pesantren, termasuk dengan memasukkan berbagai pelajaran ekonomi dan keterampilan ke pesantren.

EKONOMI PESANTREN, KYAI DAN SANTRI

Dalam bagian berikut akan diidentifikasi bagaimana karakteristik struktur ekonomi pesantren beserta pola hidup kyai dan santri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya masing-masing. Hal ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana pesantren dikelola, bagaimana kyai memenuhi kebutuhan hidupnya dan santri mencukupi kebutuhannya sehari-hari dalam perspektif ekonomi.

A. *Ekonomi Pesantren*

Ketika masih berukuran kecil dengan murid hanya puluhan orang, dan kyai menjadi pengajar tunggal, maka pesantren dapat dikatakan seolah-olah menjadi milik pribadi kyai. Pada tahap ini kyai mampu memenuhi segala kebutuhan, termasuk kebutuhan tenaga pengajar dan kebutuhan ekonomi, karena kyai umumnya adalah kelompok mampu dipedesaan (Dhofier, 1994). Kebutuhan ekonomi pesantren relatif kecil dan mudah, karena hanya membutuhkan sebuah tempat pertemuan sederhana, yang dapat berupa rumah kyai itu sendiri atau masjid. Para santri tinggal di pondok-pondok yang dibangunnya sendiri dan memenuhi makannya secara sendiri-sendiri pula, sementara kyai hanya perlu memikirkan kebutuhan ekonomi keluarganya saja. Pada pesantren yang kecil tidak ditemukan adanya iuran yang tetap dari santri, kecuali sumbangan untuk kebutuhan penerangan (lampu atau listrik). Aktivitas pendidikan terbatas hanya pada malam hari, sehingga pada siang hari mereka hidup sebagaimana layaknya penduduk desa yang lain. Tidak jarang para kyai juga terjun langsung ke sawahnya sendiri, sementara para santri, terutama yang berasal dari daerah sekitar melakukan aktivitas sebagaimana biasanya di pertanian. Beberapa pondok ada yang telah berusia puluhan tahun, bahkan lebih dari seratus tahun, namun tetap saja dengan pola hidup demikian. Hal ini salah satunya disebabkan, karena tidak semua pondok berkeinginan menjadi pondok yang besar dengan murid ratusan orang. Pondok-pondok yang kecil tersebut tetap dibutuhkan sebagai tahap awal, dan jika alumninya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dapat pindah ke pesantren lain.

Namun ketika pesantren semakin besar, dan membutuhkan bantuan pihak lain untuk pembangunan sarana fisik dan lain-lain, maka pesantren menjadi milik masyarakat. Biasanya tanah beserta bangunan yang didirikan berada di atas tanah wakaf, dan tidak menjadi

milik siapapun secara pribadi. Sumbangan dari masyarakat tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar saja, namun juga masyarakat yang jauh, yang dikolektif oleh para santri di kampung tempat ia berasal yang jaraknya bisa dari lokasi yang jauh bahkan antar pulau (Dhofier, 1994).

Namun, saat sekarang, khususnya bagi pesantren yang besar, iuran santri adalah sesuatu yang umum, yang biasanya langsung diambil dari potongan wesel. Adakalanya besar iuran tersebut tidak sama, karena santri yang kaya membayar lebih banyak, tentunya melalui kerelaan dan kesepakatan sebelumnya antara pihak pesantren dan keluarga santri. Bagi pesantren besar yang sudah berbentuk yayasan dan menerapkan jenis pendidikan dengan kurikulum Departemen Agama, pembayaran SPP sudah menjadi suatu yang umum dengan besar yang sudah ditentukan (Taryoto dkk., 1997; Rachmat dkk. 1998). Sumber lain bagi pemenuhan ekonomi pada pesantren yang sudah berbentuk yayasan adalah sumbangan donatur baik tetap atau insidental, usaha pesantren sendiri, bantuan pemerintah, bantuan tetap dari sesuatu yayasan yang besar (Yayasan Dharmais), serta bantuan yayasannya sendiri apabila manajemen keuangan yayasan dan pesantren telah dipisahkan. Usaha sendiri sudah menjadi sumber utama pemenuhan ekonomi pesantren berupa percetakan, warung dilingkungan pondok atau di luarnya, pengadaan konsumsi bagi santri, koperasi, dan usaha-usaha ekonomi lain. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Deptan mendapatkan bahwa dari 200 pondok pesantren yang didata hanya 17 buah (8,5 %) diantaranya yang tidak memiliki usaha sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sifat kemandirian selalu ingin dipertahankan dengan semakin memperbesar usaha-usaha sendiri.

B. *Ekonomi Kyai*

Meskipun pesantren yang kecil-kecil tersebar secara luas di pelosok-pelosok kampung sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah oleh siapa saja yang ingin belajar di sana, namun untuk menjadi seorang kyai harus didapatkan dari pesantren lain dengan berpindah-pindah beberapa kali di tempat-tempat yang jauh dan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Itulah kenapa untuk menjadi seorang kyai tidaklah dapat dipenuhi oleh semua golongan. Karena itu hanya sebagian kecil keluarga petani yang dapat mengirimkan anak-anaknya sampai tingkat lanjut. Hal inilah yang menyebabkan para pemimpin pondok pesantren, yaitu mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di

pondok-pondok terkemuka dengan kualifikasi tertentu, hanya berasal dari keluarga-keluarga agak berada juga. Kyai-kyai di pedesaan Jawa termasuk orang-orang yang memiliki kekayaan cukup memadai dan dapat menunaikan ibadah haji (Dhofier, 1994). Geertz (1997) juga menemukan bahwa umumnya pesantren didirikan oleh seorang yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji, dan tentu saja seorang yang bisa naik haji adalah orang yang secara ekonomi tergolong pada lapisan menengah-atas.

Meskipun kyai-kyai pesantren menyebut dirinya "*Al-Faqir*" (siskin), yaitu segala sesuatu adalah milik Allah dan materi hanya boleh dipakai untuk jalan Allah, namun mereka tidak anti kekayaan dan tetap menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang penting (Geertz, 1997). Dalam Islam, pemilik mutlak dari segala sesuatunya adalah Tuhan. Salah satu contoh, sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci Alquran, yaitu: "*..... Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan kepada Allah-lah kembali segala sesuatu*" (Al-Maidah: 17-18).

Lebih jauh Mannan (1997) menguraikan pandangan ekonomi Muslim, yaitu bahwa manusia hanya dititipi amanat. Islam memperkenankan dan bahkan mendorong setiap orang memiliki harta pribadi, tapi menghendaki agar hal ini membawa perbaikan untuk masyarakat secara keseluruhan. Pada umumnya perintah etis kepada para pemilik harta benda adalah: memanfaatkan harta benda sebanyak-banyaknya tanpa memberi pengaruh yang merugikan kepentingan masyarakat, membayar zakat, membelanjakan harta benda "di jalan Allah", tidak mengambil bunga, serta menghindari kecurangan dalam urusan bisnis, perhimpunan ataupun monopoli.

Penyatuan aspek ekonomi dan Islam, atau lebih khususnya kesalinghubungan antara perdagangan dan perkembangan Islam adalah sesuatu yang umum di tanah air semenjak dahulu, bahkan masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui para pedagang dari India, yang kemudian dikembangkan dari daerah ke daerah oleh para pedagang lokal (Jonge, 1989; Geertz, 1989). Hal ini juga dapat dilihat dari organisasi NU sebagai organisasi yang berbasiskan pesantren, dimana aspek ekonomi adalah suatu yang juga penting. Pada ayat 5 Anggaran Dasarnya tahun 1979 disebutkan bahwa NU ada usaha untuk mendirikan badan-badan usaha dagang untuk memajukan kehidupan ekonomi anggota NU. Salah satu bentuk badan usaha yang diusahakan adalah koperasi-koperasi (Dhofier, 1994).

Kyai memiliki prestise sosial yang amat tinggi di lingkungan pedesaan, dan ini sebagai jalan mudah untuk menghasilkan kekayaan (Dhofier, 1994). Perlu juga dicermati, bahwa kyai memiliki-kekuasaan penuh di pesantren yang ia dirikan dan pimpin, dan kekuasaan kyai hanya dapat dikalahkan oleh kyai yang lebih besar pengaruhnya. Hal ini karena di antara sesama kyai ada hubungan intelektual dan kekerabatan.

Dari paparan di atas terlihat, bahwa aspek ekonomi yang diterima seorang kyai, yang tercermin dari sikapnya dalam hidup sehari-hari, yang tentu saja diperolehnya ketika ia menjadi santri, lebih bersifat filosofis dan masih jauh dari tataran praktis. Hal ini terbukti dari penelitian Yusdja dk.. (199) dimana para kyai banyak yang tidak memahami sistem syariah sebagaimana yang ingin dikenalkan dalam Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) melalui koperasi-koperasi di pondon pesantren (Koppontren). Akibatnya para kyai bahkan menolak sistem syariah karena dinilai terlalu bertele-tele dan tidak pasti, sehingga memerintahkan untuk menggunakan pola umum saja dengan pembagian jasa secara tetap.

Saat ini, bersamaan dengan maraknya perubahan organisasional pesantren menjadi yayasan, sosok pimpinan pesantren yang dulu bergelar "Kyai Haji" juga telah mulai digantikan oleh sosok pimpinan yang bergelar Doktorandus, atau transformasi dari "K.H." ke "Drs." (Steenbrink, 1974). Para pimpinan pesantren yang bergelar Drs. banyak ditemukan pada pesantren yang berbentuk yayasan dengan pola pendidikan madrasah, yang adakalanya adalah pegawai di Departemen Agama, atau mereka yang karena keinginan sendiri mendirikan pesantren dengan modal ekonomi cukup kuat atau karena memiliki sumber dana cukup dan teratur.

C. Ekonomi Santri

Menurut pengamatan Dhofier (1994) yang mengamati kehidupan pesantren secara mendalam di pesantren Tebu Ireng (Jombang, Jawa Timur) sebagai contoh pesantren besar dan membandingkannya dengan pesantren Tegal Sari (Salatiga, Jawa Tengah) sebagai contoh pesantren berukuran sedang, biaya belajar di kedua pesantren tergolong mahal. Komponen biaya tersebut adalah berupa biaya perjalanan, ongkos hidup, dan membeli kitab-kitab. Selain itu juga perlu diperhitungkan *opportunity cost* yang hilang sebagai tenaga dalam keluarga yang potensial pada umur-umur produktif tersebut. Untuk itu biaya hidup santri di

pesantren tidak hanya ditanggung orang tua sendiri, namun juga dari keluarga dekat, dan bahkan orang-orang sekampung tempat santri tersebut berasal. Adakalanya santri yang potensial dibiayai oleh seorang kaya yang bermaksud menjadikannya menantu di kemudian hari. Karena biaya yang tergolong mahal tersebut, tak heran hanya keluarga-keluarga kaya yang dapat mengirimkannya ke pesantren sampai tingkat tinggi.

Bagi santri yang kurang mampu namun memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan pendidikannya, adakalanya mereka ikut menumpang pada satu keluarga yang tinggal dekat lingkungan pesantren dan bekerja di lahan pertanian petani tersebut. Selain itu juga cukup banyak santri yang menggantungkan hidup dari kyai, yaitu dengan mengerjakan sawah dan ladang kyai. Jenis seperti ini adalah bentuk awal yang banyak dijumpai di pesantren dalam kerangka hubungan guru-cantrik, yang disebut dengan "*santri ngawulo*". Saat ini pada pesantren-pesantren modernpun masih ditemukan beberapa orang (biasanya puluhan orang) santri yang berstatus sebagai *santri ngawulo* tersebut, yaitu hidup dari dapur kyai, dan tidak membayar iuran apapun. Hal ini karena mereka berasal dari golongan keluarga yang kurang mampu. Bagi pesantren besar, biaya hidup *santri ngawulo* ini sebagian ditutup melalui subsidi dilang. *Santri ngawulo* ini biasanya jauh lebih patuh dibina dan dididik.

Kemandirian ekonomi santri setelah lulus dan terjun ke masyarakat nantinya tampaknya memang belum menjadi perhatian penting pada pesantren-pesantren. Namun penulis, dalam penelitian Yusdja dkk. (1999) menjumpai seorang kyai, seorang pimpinan pesantren di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang (Jawa Tengah), yang memiliki visi yang tegas tentang hal ini. Sayangnya, sebagaimana diakuinya, ia tidak mendapat respon yang memadai dari kalangan pengajar yang lain serta dari santri itu sendiri. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin jika para lulusannya nanti hanya menjadi "*Santri Toman*", yang hidup hanya hidup dari belas kasihan atau sedekah jamaahnya saja.

PELUANG PENGEMBANGAN EKONOMI PADA PONDOK PESANTREN

Meskipun memiliki otonomi yang tegas dan otoritas kyai bersifat hampir mutlak, pesantren sebenarnya tidak steril dari masyarakat sekitarnya yang selalu berkembang. Ia memiliki daya adaptasi dan

fleksibilitas yang memadai dalam merespon keinginan masyarakat tempatnya hidup. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh kalangan Bappenas dengan mengatakan bahwa pesantren adalah salah satu bentuk lembaga yang mandiri dan mengakar pada masyarakat. Contoh yang paling ekstrim dari sifat keterbukaannya adalah, adalah diterimanya pola pendidikan Barat ke dalam sistem pendidikan di pesantren, yaitu pola madrasah. Hal ini dapat dipandang sebagai satu perubahan yang berani dan berskala besar, karena pesantren tersebut pertama berdiri adalah memang untuk melawan sistem penjajahan, dan pesantren telah menjadi lambang perlawanan pada masa itu. Namun, meskipun mengalami berbagai hambatan yang besar, sekarang sistem pendidikan madrasah yang dianggap bentuk pendidikan Barat yang menggunakan bangku dan papan tulis, telah diterima secara luas. Cukup banyak pesantren-pesantren besar saat ini yang selain tetap mengajarkan kitab-kitab standar pada malam hari juga melengkapi dengan sistem pendidikan madrasah pada siang hari.

Meskipun banyak yang mengungkapkan adanya otoritas penuh dan tunggal dari kyai, namun struktur sosial di pesantren sebenarnya juga demokratis, atau setidaknya memiliki peluang tumbuhnya alam yang demokratis. Hal ini dapat dibuktikan dari berubahnya struktur organisasi yang pada mulanya bersifat sentralistik sekarang telah dibagikan kepada beberapa pengurus lain, khususnya pada organisasi yang berbentuk yayasan. Bukti lainnya adalah tidak ditabukannya kehidupan politik dalam pesantren. Namun pesantren hanya akan terlibat di politik sepanjang itu menunjang tujuan utamanya, yaitu melestarikan dan mengembangkan Islam dalam masyarakat (Dhofier, 1994).

Pesantren sebagai lembaga yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam tidak otomatis juga menyebarkan bagaimana Islam memandang perihal perekonomian secara panjang lebar. Karena tampaknya aspek perekonomian yang diajarkan lebih terbatas dalam tataran filosofis dan lemah dalam tataran praktis. Para kyai dan santri hapal dengan baik perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dalam memperoleh pendapatan, serta bagaimana pendapatan tersebut dipergunakan. Namun, bagaimana memperoleh peluang usaha, manajemen usaha yang baik, dan bentuk-bentuk sistem ekonomi syariah, sangat sedikit kalangan pesantren yang memahaminya. Itulah kenapa banyak kyai yang tidak mendukung sistem ekonomi syariah diterapkan dalam proyek P2KER (Yusdja, 1999). Dalam pesantren

disampaikan tentang kesejahteraan hidup didunia dan bagaimana rambu-rambu yang harus diikuti dalam cara keluarga muslim memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pengetahuan ekonomi dalam pengertian bisnis tampaknya kurang dipahami. Semboyan umum yang banyak dijumpai di kalangan muslim misalnya adalah :”mereka tidak menolak materi, namun juga tidak mau diperbudak oleh benda-benda”

Visi ekonomi dalam pesantren, dalam tataran filosofis, terlihat dari cita-cita yang ditanamkan di pesantren terhadap santri, yaitu kemandirian ekonomi. Hal ini diperoleh melalui latihan untuk berdiri sendiri dan membina diri agar tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain, kecuali pada Allah (Dhofier, 1994). Latihan untuk berdiri sendiri adalah dengan menerapkan konsep kebutuhan hidup minimal, atau disebut Madjid (1997) pandangan non-materialistik atau semangat kesederhanaan. Inilah yang mungkin agak berbeda dengan konsep ilmu ekonomi di masyarakat awam saat ini yang terdistorsi dan mewujudkan menjadi lebih mengedepankan pendapatan maksimal. Dalam kehidupan pesantren sehari-hari yang sederhana, bahkan cenderung kelihatan sengsara, para santri diajar tentang konsep kebutuhan hidup seminimal mungkin, yang terlihat dari pola makan, pakaian yang dikenakan, dan tempat tinggal. Jikapun mereka bekerja di sawah-sawah penduduk sekitar, namun bukanlah untuk mengejar konsumsi yang berlebih, namun hanya sekedar menahan konsumsi agar tidak jatuh di bawah batas terendah.

Dengan mempelajari struktur internal dan eksternal pondok pesantren akan dapat dijumpai peluang-peluang pengembangan ekonomi bagi mereka dan bagi masyarakat sekitar. Salah satu peluang ekonomi yang lebih luas adalah dari adanya sistem jaringan antar pesantren. Jaringan tersebut terbangun melalui jaringan keluarga antar kyai dan jaringan alumni. Perkawinan antar anak kyai menyebabkan para pimpinan antar pesantren memiliki hubungan kekerabatan. Selain antar kyai juga terjalin hubungan silaturahmi antar pondok, yaitu dengan kebiasaan mengirim anak seorang kyai belajar di tempat lain. Kebiasaan mengirim anak ke pesantren lain adalah sesuatu yang umum selama ini, yang salah satunya juga berfungsi untuk menumbuhkan kemandirian pada anaknya. Hal ini kemudian adakalanya berlanjut dengan perkawinan antar anaknya.

Sementara itu, jaringan antar pondok karena alumni terbentuk karena para alumni mendirikan pondok baru di tempat lain. Hal ini didorong oleh

kyainya untuk menyebarkan pondok secara geografis. Pesantren yang baru terbentuk tersebut merasa diri sebagai cabang dan biasanya tetap mengakui pesantren bekas kyainya belajar tersebut sebagai pusat. Hubungan silaturahmi antar alumni dijaga melalui pertemuan rutin antar alumni. Selain itu kyai baru tersebut secara berkala mendatangi mantan gurunya untuk meminta nasihat maupun berkah, bahkan termasuk untuk kebutuhan ekonomi pondoknya.

Selain itu, adalah juga sesuatu yang umum, para santri berpindah-pindah dari satu pondok ke pondok lain, karena masing-masing pondok memiliki spesifikasi ilmu yang diajarkan dengan tingkatan yang berlainan. Jika seseorang ingin menjadi kyai yang terpadang, maka ia harus mendatangi beberapa orang kyai. Kebiasaan memilih pesantren yang jauh dari rumah juga didorong keyakinan bahwa semakin jauh tempat belajar, maka amalnya juga semakin tinggi. Taryoto dkk. (1997) dan Rachmat dkk. (1998) menemukan bahwa murid-murid yang berasal dari propinsi lain memiliki proporsi yang cukup besar, padahal di propinsi tempat ia berasal sebenarnya juga ada pesantren yang mungkin lebih baik dan lebih murah.

Seberapa jauh visi ekonomi telah masuk dalam pesantren-pesantren, dapat juga dilihat dari tumbuhnya perbedaan yang tegas antara pesantren modern dengan pesantren tradisional. Hal ini sejajar dengan berkembangnya pengkategorian Islam modern dan tradisional di tengah masyarakat kita. Menurut Geertz (1989), perbedaan Islam modern dan tradisional bukanlah bersifat teologis namun praktis. Islam modern mengukur segala sesuatu dengan kemajuan yang diperoleh bangsa-bangsa lain didunia, sedangkan Islam tradisional pada pemenuhan hidup di akhirat. Prioritas Islam tradisional adalah “hindari dosa”, sedangkan Islam modern pada “raih kemajuan peradaban”. Jika saat ini pesantren modern juga telah banyak, maka kita dapat optimis bahwa paham “Islam modern” juga telah menyebar.

Meskipun demikian, kesimpulan bahwa pesantren tradisional yang mengajarkan paham Islam tradisional kurang mendorong kemajuan ekonomi, adalah kesimpulan yang tergesa-gesa dan salah. Dalam penelitiannya, Geertz (1989) menemukan bahwa etos kerja kaum pedagang yang berasal dari kalangan santri sangat tinggi dan dapat disejajarkan dengan Etos Protestan di masyarakat Eropa. Bagaimana golongan pedagang memperoleh kemajuan ekonomi dengan semangat keislamannya juga diuraikan secara panjang lebar dalam penelitian Jonge (1989) dalam komunitas Madura.

Penelitian Sobary (1995) di tengah masyarakat Betawi yang kental semangat keislamannya, menemukan bahwa kesalehan yang terkait dengan ibadah memiliki dua bentuk, yaitu kesalehan ritualistik (ibadah khusus) dan kesalehan sosial (ibadah sosial) yaitu berupa bekerja mencari nafkah mendapatkan. Ia mendapatkan pandangan yang tumbuh di masyarakat bahwa: *"Orang yang menyeimbangkan ushali dengan usaha, keduanya sama pentingnya. Namun, menempatkan usaha di atas ushali adalah lebih baik, karena lebih nampak dan konkret"*. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa kuatnya orientasi duniawi adalah wujud dari semangat keislaman.

Islam dan ekonomi memiliki hubungan historik yang sangat dekat khususnya di Indonesia, karena Islam menyebar melalui perdagangan. Peranan pedagang ini kemudian melemah, karena Belanda memonopoli perdagangan, sehingga peran pedagang dalam penyebaran Islam diambil alih oleh petani atau pemilik sawah pertanian (Zaini, 1995). Itulah kenapa para Kyai pengasuh pesantren di Jawa banyak yang berasal dari petani. Namun demikian, di beberapa tempat peran pedagang masih tetap eksis. Dalam penelitian Jonge (1989) di Madura ditemukan begitu besarnya peran pedagang (tembakau dan kebutuhan-kebutuhan pokok lain) dalam memajukan Islam di daerah tersebut.

Dalam penelitian Taryoto dkk. (1997) dan Rachmat dkk. (1998) ditemukan banyak pondok pesantren dengan murid ratusan sampai ribuan orang yang telah memiliki bidang usaha yang maju. Usaha yang dimiliki biasanya berbentuk koperasi dengan usaha di lapangan kerajinan rumah tangga, jasa, percetakan, usaha pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Sementara itu, usaha yang banyak dijalankan pada koperasi pondok pesantren adalah usah simpan pinjam dengan melibatkan masyarakat luar pondok. Bagi pondok yang besar, usaha pondok dikelola oleh bagian khusus dengan tenaga tersendiri, namun pada pondok-pondok yang kecil adakalanya masih berada langsung di tangan kyai atau pada seseorang yang dipercaya oleh kyainya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa Islam dan semangat kemajuan ekonomi memiliki hubungan historis yang dekat, sebagaimana juga dijumpai dalam pandangan hidup sehari-hari masyarakat muslim. Namun juga perlu diakui bahwa intensifitas aspek ekonomi dalam kehidupan pondok pesantren masih relatif lemah, setidaknya dalam tataran praktis. Berdasarkan kondisi tersebut, dapatlah dibangun suatu kecenderungan bahwa jika dalam pesantren aspek ekonomi belum menjadi bagian yang penting, maka

jelas aspek ekonomi adalah sesuatu yang potensial sesuai dengan semangat keislaman pada hakekatnya.

Keterlibatan Pihak Luar Selama Ini

Intervensi pihak luar ke pondok pesantren dalam mengembangkan aspek ekonomi pondok pesantren pertama kali dimulai oleh LSM/LPSM dengan memilih beberapa pondok besar dan agak maju dengan tujuan agar pesantren tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri. Hal ini mungkin diawali oleh suatu seminar "Potensi Pesantren dalam Ekonomi Rakyat" pada tahun 1971 (Rachmat dkk., 1998). Pada saat itu telah tumbuh satu pandangan dan harapan bahwa pesantren adalah satu lembaga yang potensial dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Keterlibatan pemerintah melalui departemen dimulai dengan penyebaran bibit-bibit tanaman perkebunan untuk ditanam di lahan pesantren atau di lahan masyarakat sekitar dengan dikoordinasikan oleh pesantren bersangkutan. Pengembangan agribisnis di pondok pesantren secara yuridis dipicu oleh terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama tahun 1991 dengan membentuk Forum Pengembangan Agribisnis di pondok pesantren. Keterlibatan Deptan dalam pembinaan pondok pesantren dimulai dari Tahun Anggaran 1991/1992 di bawah koordinasi Biro Perencanaan dalam Proyek Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu. Kegiatan ini terus berlanjut tiap tahun dengan melibatkan semakin banyak pondok pesantren, sampai kemudian kepada keterlibatan lebih serius Bappenas semenjak tahun 1998 dengan mengikutkan keterlibatan berbagai departemen. Hal ini didorong oleh Memorandum Kesepakatan antara Mentan, Menag, Menkop dan PPK, serta PT Bank Muamalat Indonesia tahun 1993 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren di Seluruh Indonesia. Pada TA 1997/1998 secara besar-besaran Departemen Koperasi melaksanakan Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) pada lebih kurang 900 pondok dengan kegiatan pada koperasi-koperasi pondok pesantren (Koppontren). Bersamaan dengan itu Deptan juga melaksanakan Proyek Pengembangan Agribisnis pada lembaga yang mandiri dan mengakar pada masyarakat (LM3) pada ratusan pondok di beberapa propinsi terpilih.

Setidaknya ada dua alasan utama melibatkan pondok pesantren dalam proyek pembangunan di pedesaan, namun hanya alasan pertama yang disebutkan secara jelas dalam dokumen-dokumen

tertulis. Pertama, karena pihak pemerintah merasa bahwa pesantren adalah lembaga yang hidup dan mengakar di tengah masyarakat dan dengan sumberdaya manusia yang dimilikinya diharapkan mampu sebagai penggerak ekonomi pada masyarakat sekitarnya. Hal ini cukup beralasan, karena pesantren-pesantren yang maju memiliki kemajuan ekonomi yang bagus dan sumberdaya manusia yang handal, walaupun pondok tipe itu sangat terbatas jumlahnya. Kedua, pihak pemerintah ingin dengan melibatkan pesantren dalam struktur proyek, diharapkan perilaku birokrasi yang kurang bersih akan berkurang, karena orang-orang di pesantren terkenal jujur dan tidak mudah diajak dengan kebohongan-kebohongan administratif yang sangat sulit dibuktikan dan dihapus selama ini.

Berbagai kegiatan proyek tersebut tampaknya belum memiliki konsep yang jelas dan seragam antar departemen sehingga tingkat keberhasilannya juga bervariasi. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah pemahaman yang lebih mendalam serta perlunya data dasar (*base data*). Ketidadaan perencanaan yang baik menyebabkan beberapa proyek tumpang tindih pada pondok yang sama. Pondok-pondok yang lebih maju mendapat proyek yang lebih sering, karena lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan proyek, serta karena adanya hubungan dekat pihak pesantren dengan pengambil keputusan di tingkat lokal dan nasional.

Dalam penelitian Yusdja dkk. (1999) ditemukan bahwa jumlah pondok yang siap menerima masuknya aspek ekonomi masih sangat terbatas. Sumberdaya manusia pondok pesantren juga tidak sebagaimana yang diperkirakan, khususnya dalam pemahaman aspek ekonomi dan bisnis, sehingga tingkat keberhasilan proyek relatif rendah. Selain itu, pendekatan struktur proyek yang masih bersifat sentral dan kaku, setidaknya sebagaimana diterjemahkan oleh staf-staf pelaksana di lapangan, masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Secara empirik, perkembangan Islam dan kemajuan ekonomi di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Namun, khusus pada pondok pesantren, visi ekonomi dapat dikatakan tergolong lemah, khususnya dalam tataran praktis kewirausahaan dan bisnis. Hal ini mempengaruhi lemahnya materi, khususnya materi praktis, serta keterampilan, untuk menyiapkan kemandirian ekonomi lulusannya nantinya. Atau, dapat dikatakan, sampai sejauh ini, aspek ekonomi bukanlah menjadi perhatian utama di pesantren. Pada

pesantren-pesantren yang tergolong maju, yaitu bagi pesantren-pesantren yang sudah berbentuk yayasan dengan sistem pendidikan madrasah, ekonomi dipandang lebih untuk menjaga kontinuitas dan kemajuan lembaga tersebut, atau bukan bisnis yang berorientasi pada perolehan profit. Meskipun kyai memiliki usaha pribadi, namun itu dilakukan atas nama pribadi, dan kyai tidak pernah memandang pondok sebagai objek ekonomi. Menjadikan pondok sebagai objek ekonomi tampaknya dipandang sebagai sesuatu yang kurang etis.

Meskipun menurut prinsipnya, pesantren bukanlah lembaga yang membicarakan ekonomi secara intensif, atau bukanlah sebagai suatu lembaga ekonomi dalam masyarakat, namun perubahan masyarakat yang menjadikan ekonomi sebagai aspek dominan, juga ikut mempengaruhi kehidupan pesantren. Aspek ekonomi menjadi bagian penting dalam pesantren, khususnya pada pesantren-pesantren yang berbentuk yayasan

Menjadikan pesantren sebagai lembaga penggerak ekonomi desa, bukanlah suatu yang mustahil, namun perlu selektif dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuannya. Usaha ini dapat dipercepat melalui penetrasi pihak luar yang dapat berupa bermacam-macam wujudnya, misalnya pengkayaan kurikulum, pemberian keterampilan, pendampingan, bantuan dana, dan lain-lain. Intervensi pihak luar harus dilakukan secara hati-hati dan perlu pembatasan-pembatasan agar jangan sampai melemahkan otonomi pesantren tersebut. Satu hal yang perlu dihindari dalam hal ini adalah, jangan sampai pesantren kehilangan perannya sebagai benteng terakhir moral di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1993. *Ensiklopedi Islam: 4 Nah-Sya*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES. Jakarta. Cet. VI, Februari 1994 192 hal.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan: Aswab Mahasin. Judul Asli: *The Religion of Java*. Pustaka Jaya. Jakarta. Cet. III xxii+ 551 hal
- Jonge, Huub de. 1989. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. (suatu Studi Antropologi Ekonomi). (Terjemahan) PT Gramedia, Jakarta. (316 hal.)

- Karim, M. Rusli. 1985. *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial Politik*. PT. Hanindita. Yogyakarta. Cet.I viii+317 hal.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Penerbit Paramadina. Jakarta. xxvii+143 hal.
- Mahali, A. Mudjab dan Umi Mujawazah Mahali. 1994. *Kode Etik Kaum Santri*. Penerbit Al- Bayan (Kelompok Penerbit Mizan) Bandung. Cet V. 176 hal.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. (Terjemahan). Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf , Jakarta. (419 hal.)
- Mujahidin, E. 1997. *Partisipasi Pemimpin Pondok Pesantren dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Bogor*. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rachmat, Muchjidin. Dkk. 1998. *Studi Pengembangan Agribisnis Pedesaan melalui Pemberdayaan Pondok Pesantren*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Bogor.
- Sajogyo. 1992. *Partisipasi Yang Komplit*. Dalam: *Majalah Inovasi No. 11 Tahun V*.
- Sobary, Mohamad. 1995. *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*. Yayasan Bentang Budaya. Yogyakarta. Cet. I. 234 hal.
- Steenbrink, Karel A. 1974. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. LP3ES, Jakarta (261 hal.)
- Taryoto, Andin H. dkk. 1997. *Studi Persiapan Program Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Bogor.
- Yusdja, Yusmichad; Supena Friyatno; Nyak Ilham; Syahyuti; Sri Hastuti; Yana Supriyatna; dan Khairina M. Noekman. 1999. *Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Bogor.
- Zaini, Wahid. 1995. *Dunia Pemikiran Kaum Santri*. Cet. 2. Penerbit LKPSM NU-DIY Yogyakarta (156 hal).